



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 24 Agustus 2019

Halaman: 1

KPK Temukan Rp 130 Juta, Walikota Yogyakarta: Saya Tidak Tahu

UMBULHARJO (MERAPI)
- Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti enggan berkomentar terkait temuan dan penyitaan uang Rp 130 juta oleh KPK di rumah Kepala Bidang Sumber Daya Air (Kabid SDA) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) setempat. Tim penyidik KPK sebelumnya menggeledah rumah Kabid SDA dan Kantor Dinas PUPKP serta Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Kota Yogyakarta terkait suap oknum jaksa pada proyek drainase Jalan Soepomo Cs.

"Saya tidak tahu. Itu urusan KPK dengan yang bersangkutan," kata Haryadi singkat, Jumat (23/8).

Dia menegaskan temuan uang itu menjadi ranah KPK sebagai pihak yang melakukan penggeledahan.

* Bersambung ke halaman 9



MERAPI-ANTARA/HENDRA NUSDIYANSYAH

Penyidik KPK berjalan usai melakukan pemeriksaan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta, Kamis (22/8).

KPK

Dia menyebut KPK sudah melakukan pemeriksaan di Dinas PUPKP dan BLP Kota Yogyakarta pada Kamis (23/8) sebagai tindak lanjut pemeriksaan saksi (dua PNS Pemkot) di Jakarta.

"Sudah hadir memeriksa berkas. Dan alhamdulillah sudah selesai proses pemeriksaan kemarin," ujarnya.

Namun dia mengaku tidak mengetahui status Kabid SDA Dinas PUPKP pasca KPK melakukan penggeledahan kemarin. Sebelumnya dia menyatakan dua PNS Pemkot Yogyakarta yakni Kabid SDA Dinas PUPKP dan Pokja Lelang lam koridor proses koordinasi dengan KPK. Tapi dia menegaskan Pemkot Yogyakarta memegang prinsip asas praduga tak bersalah.

iKami pegang teguh asas praduga tak bersalah. Jika bersalah tentu ada proses hukum,i imbuhnya.

Sebagaimana diketahui KPK melakukan OTT oknum jaksa dari Kejari Yogyakarta di Solo oleh KPK Senin (19/8) malam. OTT itu diduga terkait Tim Pengawalan, Pengamanan, Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat-Daerah (TP4D) terhadap proyek drainase Jalan Soepomo Cs

Pengadaan Proyek Drainase Jalan Soepomo Cs sudah pulang setelah diminta klarifikasi oleh KPK di Jakarta.

iSaya tidak tahu. Itu ranah KPK yang memeriksa. Kami Pemkot Yogyakarta menghormati proses hukum yang dilakukan KPK,i tambah Haryadi.

Dia menyatakan akan terus melihat perkembangan proses hukum oleh KPK terkait kasus dugaan suap oknum jaksa pada proyek saluran drainase di Jalan Soepomo. Ditanya soal bantuan hukum kepada PNS Pemkot Yogyakarta yang dimintai klarifikasi oleh KPK, dia mengatakan da

Sambungan halaman 1

Yogyakarta yang bernilai Rp 8,3 miliar. Pada Selasa (20/8) KPK menetapkan tiga tersangka yakni oknum jasa Kejari Yogyakarta dan Solo serta rekanan pihak swasta yang menangani proyek. Sedangkan dua PNS Pemkot Yogyakarta sempat diamankan ke Jakarta dan diminta klarifikasi atau saksi. Kemudian KPK menggeledah kantor Balai Kota Yogyakarta pada Kamis (22/8) serta rumah kepala bidang (Kabid SDA) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) hingga menemukan uang Rp 130 juta.

(Tri) -a

Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			
3. Dinas PUPKP			
4. Bagian Layanan Pengadaan			

Yogyakarta, 12 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005